

PERATURAN DAERAH

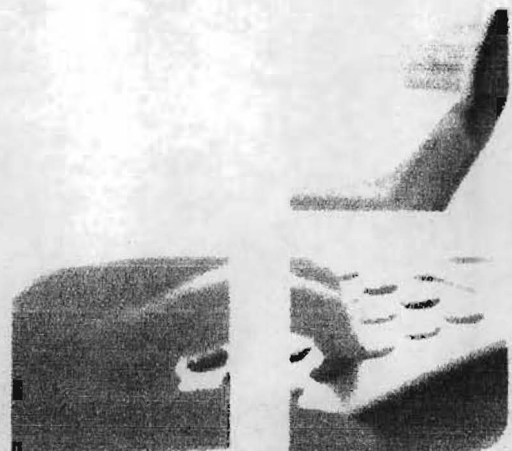
NOMOR : 01 TAHUN 2014

TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013





PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paing lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 14 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 - 20 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 - 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

23. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2013.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAYBRAT
Dan
BUPATI MAYBRAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	646.731.725.836,00		
b. Belanja	Rp	650.261.403.727,00		
Surplus/ (defisit)			Rp	(3.529.677.891,00)
c. Pembiayaan				
Penerimaan	Rp	82.604.620.776,00		
Pengeluaran	RP	7.442.298.818,00		
Pembiayaan Neto			Rp	75.162.321.958,00
			Rp	<u>71.632.644.067,00</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(32.489.404.441,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	614.242.321.395,00
b. Realisasi	Rp	646.731.725.836,00
Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>32.489.404.441,00</u>
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(39.057.162.531,20) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	689.318.566.258,20
b. Realisasi	Rp	650.261.403.727,00
Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>(39.057.162.531,20)</u>
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(defisit) sejumlah Rp71.546.566.972,20 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(75.076.244.863,20)
b. Realisasi (defisit)	Rp	(3.529.677.891,00)
Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>71.546.566.972,20</u>
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan setelah perubahan	Rp	82.604.620.776,00
b. Realisasi	Rp	82.604.620.776,00
Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>0,00</u>

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(1.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>(1.500.000.000,00)</u>

(6) Selisih anggaran dengan realisasipembiayaan netto sejumlah Rp(57.701.182,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	7.500.000.000,00
b. Realisasi	Rp	7.442.298.818,00
Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>(57.701.182,00)</u>

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal1 huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	850.361.572.523,00
b. Jumlah Kewajiban	Rp	(113.649.795,00)
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp	<u>850.475.222.318,00</u>

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31Desember 2013 sebagai berikut :

a. Saldo awal per 1 Januari 2013	Rp	89.053.291.210,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	280.982.474.362,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp	(284.512.152.253,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(7.442.298.818,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(4.963.625.134,00)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2013	Rp	<u>71.518.994.272,00</u>

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
 - Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan Lanjutan
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan Keuangan

Pasal 8

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah nomor 01.

Ditetapkan di Ayamaru
pada tanggal 8 September 2014





PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(TAHUN ANGGARAN 2013)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	614.742.321.395,00	646.731.725.836,00	32.489.404.441,00	105,29
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.243.064.078,00	10.328.230.252,00	6.085.166.174,00	243,41
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	790.000.000,00	204.330.000,00	(495.670.000,00)	29,19
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	694.435.932,00	396.657.888,00	(297.778.044,00)	57,12
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.848.628.146,00	9.726.742.364,00	6.878.114.218,00	341,45
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	607.600.554.317,00	634.004.792.584,00	26.404.238.267,00	104,35
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	482.142.281.353,00	499.306.148.555,00	17.163.867.202,00	103,56
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	31.223.223.127,00	18.271.784.764,00	(12.951.438.363,00)	58,52
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	12.050.275.226,00	42.165.580.791,00	30.115.305.565,00	349,91
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	353.978.783.600,00	353.978.783.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	84.890.000.000,00	84.890.000.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	81.766.070.000,00	81.764.352.684,00	(1.647.316,00)	100,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	81.766.000.000,00	81.764.352.684,00	(1.647.316,00)	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	43.692.272.964,00	52.934.291.345,00	9.242.018.381,00	121,15
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	43.692.272.964,00	52.934.291.345,00	9.242.018.381,00	121,15
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.398.703.000,00	2.398.703.000,00	0,00	100,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	2.398.703.000,00	2.398.703.000,00	0,00	100,00
2	BELANJA	689.318.566.258,20	650.261.403.727,00	(39.057.162.531,20)	94,33
2.1	BELANJA OPERASI	392.364.022.443,20	365.749.251.474,00	(26.614.771.369,20)	93,22
2.1.1	Belanja Pegawai	153.442.527.200,20	138.668.836.939,00	(14.773.690.261,20)	90,37
2.1.2	Belanja Barang	142.542.604.943,00	133.079.026.773,00	(9.463.578.170,00)	93,36
2.1.5	Belanja Hibah	43.616.490.700,00	41.761.707.762,00	(1.874.782.938,00)	95,70
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.905.000.000,00	27.402.280.000,00	(502.720.000,00)	98,20
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	24.837.400.000,00	24.837.400.000,00	0,00	100,00
2.2	BELANJA MODAL	296.954.543.815,00	284.512.152.253,00	(12.442.391.562,00)	95,81



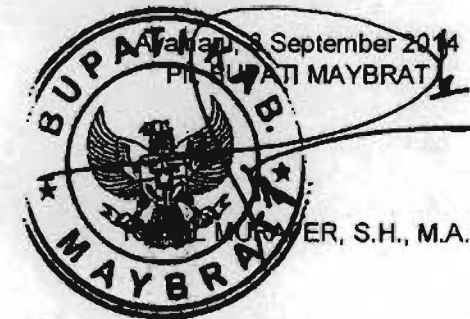
PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
 Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2	BELANJA	88.069.392.829,00	81.763.707.588,00	(6.305.685.241,00)	92,84
2.1	BELANJA OPERASI	60.750.332.829,00	57.084.458.935,00	(3.665.873.894,00)	93,97
2.1.1	Belanja Pegawai	40.150.235.199,00	38.363.207.393,00	(1.787.027.806,00)	95,55
2.1.2	Belanja Barang	4.534.910.630,00	4.088.010.000,00	(446.800.630,00)	90,15
2.1.5	Belanja Hibah	16.065.287.000,00	14.633.241.542,00	(1.432.045.458,00)	91,09
2.2	BELANJA MODAL	27.319.060.000,00	24.679.248.653,00	(2.639.811.347,00)	90,34
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.341.449.000,00	7.161.665.453,00	(179.783.547,00)	97,55
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	19.047.111.000,00	16.593.083.200,00	(2.454.527.800,00)	87,11
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	930.000.000,00	924.500.000,00	(5.500.000,00)	99,41
	SURPLUS / (DEFISIT)	(88.069.392.829,00)	(81.763.707.588,00)	6.305.685.241,00	92,84
	PEMBIAYAAN NETTO				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(88.069.392.829,00)	(81.763.707.588,00)	6.305.685.241,00	92,84

PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengkuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1		NIHIL				
2						
3						
4						
	Jumlah		-	-	-	-



Atas nama, 8 September 2014
BUPATI MAYBRAT
MURAWER, S.H., M.A.

PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Investasi Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2013	PT. BANK PAPUA		Saham	7.000.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	-	396.657.888	-	7.000.000.000
		Jumlah	-	-	7.000.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	-	396.657.888	-	7.000.000.000

Ayamuru, 8 September 2014
 P. BUPATI MAYBRAT

KAREL MURAFER, S.H., M.A.

PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Tanah	10.434.640.045,00	4.150.000.000,00	0,00	14.584.640.045,00
2	Peralatan dan Mesin	35.165.606.170,00	47.489.480.114,00	0,00	82.655.086.284,00
3	Gedung dan Bangunan	207.666.094.237,00	76.637.054.739,00	0,00	284.303.148.976,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	225.289.458.662,00	154.743.357.400,00	0,00	380.032.816.062,00
5	Aset Tetap lainnya	27.162.019,00	1.492.260.000,00	0,00	1.519.422.019,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.747.464.865,00	0,00	0,00	8.747.464.865,00
		487.330.425.998,00	284.512.152.253,00		771.842.578.251,00

Ayamaru, 8 September 2014

Plt. BUPATI MAYBRAT

KAREL MURAFER, S.H., M.A.

PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	NIHIL				
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00



Tanggal : 8 September 2014

No.	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun 2001, Tahun 2012 dan Tahun 2013			Jumlah Akumulasi Realisasi s.d. Akhir Tahun n 2012	Jumlah Yang Dianggarkan Dalam APBD Tahun Berikutnya
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013		
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8
			NIHIL				
	Jumlah						

Ayamaru, 8 September 2014
Pt. BUPATI MAYBRAT

KAREL MURAFER, S.H., M.A.

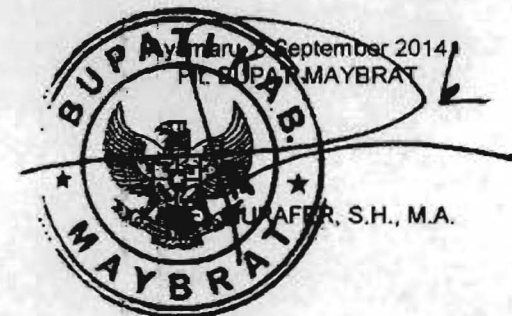
PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer Dari Kas Daerah	Transfer Ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					
Jumlah								



TAHUN ANGGARAN 2013

NIHIL





PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
NERACA

Per 31 Desember 2013 dan 2012

URAIAN	2013	2012
ASET		
ASET LANCAR	71.518.994.272,00	89.053.291.210,00
Kas	71.518.994.272,00	89.053.291.210,00
Kas di Kas Daerah	62.230.518.397,00	78.166.120.240,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	9.288.475.875,00	10.887.170.970,00
Piutang Lain-lain	0,00	0,00
Piutang Lain-lain - Lainnya	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Investasi Permanen	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00
ASET TETAP	771.842.578.251,00	487.330.425.998,00
Tanah	14.584.640.045,00	10.434.640.045,00
Tanah Petanian	1.390.000.000,00	1.390.000.000,00
Tanah Perkebunan	580.099.045,00	580.099.045,00
Tanah Lainnya	12.614.541.000,00	8.464.541.000,00
Peralatan dan Mesin	82.655.086.284,00	35.165.606.170,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	7.166.198.727,00	7.166.198.727,00
Alat-alat Bengkel	454.320.000,00	454.320.000,00
Peralatan Kantor	80.250.000,00	80.250.000,00
Perlengkapan Kantor	847.500.000,00	847.500.000,00
Komputer	711.475.000,00	711.475.000,00
Meubelair	4.184.348.400,00	4.184.348.400,00
Peralatan Dapur	21.600.000,00	21.600.000,00
Alat-alat Studio	108.725.000,00	108.725.000,00
Alat-alat Laboratorium	886.840.759,00	886.840.759,00
Peralatan dan Mesin Lainnya	68.193.828.398,00	20.704.348.284,00
Gedung dan Bangunan	284.303.148.976,00	207.666.094.217,00
Gedung Kantor	11.901.982.500,00	11.901.982.500,00
Gedung Rumah Dinas	8.448.313.000,00	8.448.313.000,00
Gedung Gudang	1.246.180.272,00	1.246.180.272,00
Gedung Sekolah	5.248.345.420,00	5.248.345.420,00
Gedung Serba Guna	5.806.205.298,00	5.806.205.298,00
Bangunan Tower	298.200.000,00	298.200.000,00
Gedung Asrama/Panti Asuhan	1.495.710.303,00	1.495.710.303,00
Gedung dan Bangunan Lain-Lain	249.858.212.183,00	173.221.157.444,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	380.032.816.062,00	225.289.458.662,00
Jalan	69.369.797.000,00	69.369.797.000,00
Jembatan	2.983.550.000,00	2.983.550.000,00
Jaringan Air	3.433.890.700,00	3.433.890.700,00
Instalasi Listrik dan Telepon	10.104.321.455,00	10.104.321.455,00
Jalan, Jaringan, dan Instalasi Lain-Lain	294.141.256.907,00	139.397.899.507,00
Aset Tetap Lainnya	1.519.422.019,00	27.162.019,00
Aset Tetap Lainnya	1.519.422.019,00	27.162.019,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	8.747.464.865,00	8.747.464.865,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	8.747.464.865,00	8.747.464.865,00
JUMLAH ASET	850.361.572.523,00	578.383.717.208,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(113.649.795,00)	6.448.670.434,00
	(113.649.795,00)	6.448.670.434,00
JUMLAH KEWAJIBAN	(113.649.795,00)	6.448.670.434,00
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	71.632.644.067,00	82.604.620.776,00
	71.632.644.067,00	82.604.620.776,00

URAIAN	2013	2012
EKUITAS DANA INVESTASI	778.842.578.251,00	489.330.425.998,00
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	771.842.578.251,00	487.330.425.998,00
JUMLAH EKUITAS DANA	850.475.222.318,00	571.935.046.774,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	850.361.572.523,00	578.383.717.208,00

Ayamaru, 8 September 2011

Pt. BUPATI MAYBRAT

KAREL MURAFER, S.H., M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2013 dan 2012

URAIAN	2013	2012
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	500.000,00	0,00
Hasil Retribusi Daerah	204.330.000,00	10.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	396.657.899,00	140.956.087,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.726.742.364,00	2.865.076.298,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	60.437.365.555,00	41.400.925.347,00
Dana Alokasi Umum	353.978.783.000,00	277.798.391.000,00
Dana Alokasi Khusus	84.890.000.000,00	38.200.060.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	52.934.291.345,00	10.268.609.554,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81.764.352.684,00	60.036.811.057,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.444.170.812,00
Dana Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.396.703.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	646.731.725.836,00	432.165.000.155,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	138.668.836.939,00	100.787.589.201,00
Belanja Hibah	14.779.200.000,00	7.364.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial	27.402.280.000,00	26.458.790.500,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	24.837.400.000,00	23.437.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa	160.061.534.535,00	136.894.396.808,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	365.749.251.474,00	294.942.376.509,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	280.982.474.362,00	137.222.623.646,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Pengadaan Tanah	4.150.000.000,00	2.044.849.045,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	49.500.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	26.855.538.750,00	1.425.525.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	1.086.030.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.728.261.364,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	259.139.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	769.700.000,00	13.354.698.486,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	887.650.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.158.020.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair	4.266.994.544,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	31.446.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	64.055.455,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	320.980.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	146.000.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.920.214.547,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	3.864.865.454,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	133.926.896.000,00	87.939.857.155,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.995.200.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	17.963.761.400,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	857.500.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	76.637.054.739,00	36.865.653.315,00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.492.260.000,00	244.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	717.700.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Prasarana Perhubungan	363.385.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	284.512.152.253,00	141.874.583.001,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(284.512.152.253,00)	(141.874.583.001,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	2.442.298.818,00	10.333.892.769,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	7.442.298.818,00	10.333.892.769,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(7.442.298.818,00)	(10.333.892.769,00)

URAIAN	URUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		URUS KAS MASUK		URUS KAS KELUAR	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	45.432.622.905,00	0,00	45.432.622.905,00	0,00	51.994.943.134,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	45.432.622.905,00	0,00	45.432.622.905,00	0,00	51.994.943.134,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	45.432.622.905,00	0,00	45.432.622.905,00	0,00	51.994.943.134,00	0,00
Arus Kas Keluar	51.994.943.134,00	0,00	51.994.943.134,00	0,00	51.994.943.134,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	51.994.943.134,00	0,00	51.994.943.134,00	0,00	51.994.943.134,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	51.994.943.134,00	0,00	51.994.943.134,00	0,00	51.994.943.134,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(6.562.320.229,00)	0,00	(6.562.320.229,00)	0,00	0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(17.534.296.938,00)	(14.985.852.124,00)	(17.534.296.938,00)	(14.985.852.124,00)	0,00	0,00
Saldo Awal Kas	89.053.291.210,00	104.039.143.334,00	89.053.291.210,00	104.039.143.334,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	71.518.994.272,00	89.053.291.210,00	71.518.994.272,00	89.053.291.210,00	0,00	0,00
Terdiri Dari :						
Kas di Kas Daerah	62.230.518.397,00	78.166.120.240,00	62.230.518.397,00	78.166.120.240,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	9.288.475.875,00	10.887.170.970,00	9.288.475.875,00	10.887.170.970,00	0,00	0,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Yamamu, 8 September 2014

 ARE HURFER, S.H., M.A.
 BUPATI MAYBRAT